



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI V DPR RI

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS), DAN BAPEL BPWS)**

Tahun Sidang	: 2018 – 2019
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 26 Maret 2019
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.00 WIB s.d 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (KK V), Gedung Nusantara
Acara	: 1. Rencana pengoperasian LRT dan MRT Jakarta; 2. Evaluasi penyelenggaraan LRT Palembang; 3. Evaluasi Pembangunan dan Penyelesaian Jalur Kereta Api.
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Perkeretaapian dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.25 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perkeretaapian dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan pada hari ini adalah
 - a. Rencana pengoperasian LRT dan MRT Jakarta;
 - b. Evaluasi penyelenggaraan LRT Palembang;
 - c. Evaluasi Pembangunan dan Penyelesaian Jalur Kereta Api.
3. Ketua Rapat mempersilakan Dirjen Perkeretaapian dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. CATATAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah atas peningkatan pembangunan di sektor perkeretaapian.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian untuk mengevaluasi secara komprehensif perencanaan pembangunan LRT maupun LRT yang telah dioperasikan agar terjadi peningkatan okupansi penumpang sehingga biaya operasional dapat ditutupi dan subsidi dapat semakin dikurangi.
3. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perkeretaapian untuk segera mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pembangunan LRT agar dapat segera diselesaikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perkeretaapian dan BPTJ Kementerian Perhubungan untuk melakukan integrasi tiket dan infrastruktur LRT, MRT, jalur kereta api, moda transportasi lain dan fasilitas publik lainnya dalam rangka meningkatkan layanan moda transportasi massal.
5. Komisi V DPR RI mendorong penguatan kelembagaan dan kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan transportasi Jabodetabek.
6. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan IMO (*Infrastructure Maintenance Operation*) PT. KAI dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan perkeretaapian.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 26 Maret 2019

KETUA RAPAT

ttd

FARY DJEMY FRANCIS